

Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Nurul Izzah Nasution¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Prodi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
e-mail: nizzahnst@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih terus dioptimalkan oleh pemerintah di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai penunjang pembangunan nasional Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, Sumber data yaitu laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta wawancara terstruktur. Data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lokasi penelitian di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Hasil penelitian menemukan jumlah penyeteroran PNBP Per tahun 2021 sama dengan jumlah penerimaan PNBP Pertahun 2021. Penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahkan 100% dari jumlah penerimaan PNBP.

Kata Kunci : *Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesyahbandaran.*

Abstract

Management of Non-Tax State Revenue (PNBP) is still being optimized by the government in Indonesia. In order to optimize Non-Tax State Revenue as a supporter of national development, Non-Tax State Revenue is one of the sources of state revenue that needs to be managed and utilized to improve services to the community. This study uses a descriptive quantitative analysis method, namely by explaining the methods of collecting accurate and actual quantitative data and relating to the problem under study. The data sources are financial reports and reports on activities/activities that generate Non-Tax State Revenue (PNBP) and structured interviews. . Secondary data is in the form of documents related to the management of Non-Tax State Revenue (PNBP). The research location is at the Belawan Main Harbormaster Office. The results of the study found that the amount of PNBP deposits per 2021 was the same as the amount of PNBP receipts in 2021. Non-tax State Revenue (PNBP) was submitted 100% of the total PNBP receipts.

Keywords: *Non-Tax State Revenue, Kesyahbandaran.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Keuangan Negara yang baik akan mencerminkan keadaan negara yang baik, saat ini pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan yang baik untuk menuju pemerintahan yang baik atau *good governance*, Pemerintah memiliki pendapatan terbesar yang berasal dari pajak, namun pemerintah juga mendapatkan pendapatan melalui PNBP yakni Pendapatan Negara Bukan Pajak. Saat ini Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan melalui PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional. Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki kontribusi yang cukup signifikan untuk membiayai belanja negara, meskipun jumlahnya tidak sebesar penerimaan dari sektor pajak. pendapatan negara pada dasarnya bersumber dari 2 aspek pokok yaitu penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) serta didukung oleh penerimaan hibah UU No 20 Tahun 1997 mengatur tentang pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP merupakan lingkup keuangan negara yang dikelola dan di pertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan negara dan merupakan penerimaan negara sesuai dengan undang-undang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 pasal 13 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dalam kementerian perhubungan Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara Maka, Pemerintah berupaya memenuhi keinginan masyarakat yang menginginkan adanya pelayanan penerimaan negara yang cepat, akurat dan dapat dipercaya. Pemerintah melalui kementerian keuangan pada tanggal 27 Februari 2014 membentuk sebuah fasilitas pembayaran atau penyetoran penerimaan negara melalui modul penerimaan negara generasi ke-2 (MPGN-2). Pelayanan ini diberikan dengan system elektronik dengan tujuan agar lebih mudah,cepat dan transparan. Aplikasi berbasis web bagi pembayaran pajak,cukai, PNBP, dan non anggaran yang dikenal dengan aplikasi Simponi (Sistem Informasi PNBP Online).

Aplikasi Simponi merupakan salah satu bentuk upaya dari kementerian keuangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara yang baik sehingga tercapainya good governance. Simponi adalah sebuah system untuk menetausahakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pembayaran atau penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan menggunakan aplikasi Simponi kesalahan perhitungan PNBP dapat diminimalisir, dikarenakan Simponi merupakan aplikasi yang terintegritas dalam hal pembayaran dan penyetoran dan hal ini sangat bermanfaat bagi pemerintah. Simponi ini dioperasikan secara online, sehingga dapat diakses selama 24 jam tanpa dibatasi oleh jam kerja.

Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan melaksanakan pemberian pelayanan lalu lintas dan angkutan laut mengupayakan keamanan dan keselamatan pelayaran lalu lintas dan angkutan laut mengupayakan keamanan dan keselamatan pelayaran diperairan pelabuhan untuk memperlancar angkutan laut. Dalam kegiatan operasionalnya Administrator Pelabuhan Utama Belawan bertindak atas nama Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai koordinator instansi terkait di pelabuhan.

Dalam pelaporan keuangan negara yang tercantum pada pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan berfokus pada analisis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kantor kesyahbandaran utama belawan apakah penyetoran pendapatan pnbp ke kas negara sesuai dengan penerimaan PNBP yang diterima oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif, yaitu dengan menjelaskan cara-cara pengumpulan data kuantitatif yang akurat dan aktual serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan kondisi nyata yang ada di lapangan kemudian membahas penyebab terjadinya kondisi tersebut dan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut di masa depan. Metode Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan kegiatan atau aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan (PNBP) serta wawancara terstruktur dilakukan

sebagai pelengkap informasi. Sedangkan data sekunder berupa dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam bentuk laporan keuangan serta laporan kegiatan/aktivitas yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Penelitian ini menggunakan model triangulasi yang dilakukan untuk meningkatkan validitas data yang diperoleh dengan membandingkan hasil data dari dokumen yang diperoleh dengan wawancara mengenai laporan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis Penerimaan pada Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan

Penerimaan atau disebut juga dengan pendapatan menurut PSAK No.23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

Tabel 1. Jenis Penerimaan pada kantor kesyahbandaran Utama Belawan

No	Nama Penerimaan	Singkatan
1.	Penerimaan Jasa Kenavigasian	SBNP/Rambu
2.	Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan	PUPK

Source: Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan,2022

Penerimaan Jasa Kenavigasian adalah penerimaan yang diperoleh atas jasa penggunaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/ Uang Rambu, jasa sewa fasilitas galangan navigasi, jasa TelekomunikasiPelayaran, jasa salvage dan pekerjaan bawah air, jasa pemeriksaan kesehatan, dan pemberian izin kewenangan perusahaan yang melakukan perbaikan dan perawatan peralatan keselamatan pelayaran.

Sedangkan Penerimaan Uang Perkapalan dan Kepelautan yang selanjutnya disingkat PUPK adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa bidang perkapalan dan kepelautan, jasa pengawasan barang berbahaya, dan pemeriksaan kapal asing.

Sementara itu, Untuk Analisis Persentase Rekapitulasi Penerimaan PNBP dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :

Table 2. Analisis Persentase Rekapitulasi Penerimaan PNBP

N O	BULAN	PENERIMAAN					JUMLAH
		RAMBU	PUP	PUJ K	TRANSPORT ASI LAINNYA	KONSE SI	
0	SALDO	0	0	0	0	0	0
1	JANUARI	881.331.295	129.950.705	0	0	0	1.011.282.000
2	FEBRUAR I	995.886.856	166.884.965	0	0	0	1.162.771.821
3	MARET	1.062.020.997	243.414.580	0	0	0	1.305.435.577
4	APRIL	909.104.552	171.310.755	0	0	0	1.080.415.307
5	MEI	925.780.130	163.592.205	0	0	0	1.089.372.335
6	JUNI	853.269.216	217.048.625	0	0	0	1.070.317.841
7	JULI	1.054.289.6	161.293.62	0	0	0	1.215.583.2

		38	0				58
8	AGUSTUS	955.903.668	197.040.195	0	0	0	1.152.943.863
9	SEPTEMBER	933.171.915	153.841.750	0	0	0	1.087.013.665
10	OKTOBER	850.364.278	163.318.080	0	0	0	1.013.682.358
11	NOVEMBER	956.064.611	175.149.845	0	0	0	1.131.214.456
12	DESEMBER	940.690.850	196.326.480	0	0	0	1.137.017.330
JUMLAH		11.317.878.006	2.139.171.805	0	0	0	13.457.049.811

Gambar 1. Rekapitulasi Penerimaan PNPB KSU Belawan Periode s/d Desember Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan data gambar diatas maka analisis data Rekapitulasi penerimaan pada KSU dapat disajikan dalam bentuk persentase, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk jenis uang penerimaan Rambu diperoleh dari Jasa Kenavigasian Jasa penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu
 - a. Kapal Angkatan Laut Luar Negeri
 - b. Kapal Angkatan Laut dalam Negeri
 - c. Kapal Pelayaran Rakyat
 - d. Kapal Angkatan Penyebrangan Dalam Negeri

Persentase penerimaan pertahun RAMBU 2021 adalah

$$\frac{11.317.878.006}{13.457.049.811} \times 100\% = 84,1\%$$

Dari presentase data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan RAMBU merupakan penerimaan terbesar diantara jenis penerimaan lainnya yaitu sebesar 84.1% dari total Rekapitulasi Penerimaan Tahun 2021

2. Untuk jenis penerimaan PUP adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa
 - a. Pemeriksaan dan Sertifikat yang berkaitan dengan Keselamatan Kapal
 - b. Pelaksanaan Pengukuran Kapal dan Penerbitan Surat Ukur
 - c. Pelaksanaan Audit dan Penerbitan Sertifikat Document of Compliance (DOC) dan Safety Management Certificat (SMC)
 - d. Pengujian dan Sertifikasi Perlengkapan Kapal, Keselamatan Kapal
 - e. Pengesahan Gambar Kapal
 - f. Penerbitan Dokumen Kepelautan dan Dokumen Kapal Selain Sertifikat
 - g. Pengawasan Barang Berbahaya
 - h. Pemeriksaan Kapal Asing/Port State Control atas Pemeriksaan Ulang (Reinspection)

Persentase penerimaan pertahun PUP 2021

$$\frac{2.139.191.805}{13.457.049.811} \times 100\% = 15,9\%$$

Dari presentase data tersebut dapat disimpulkan bahwa penerimaan PUP merupakan penerimaan terkecil diantara jenis penerimaan lainnya yaitu sebesar 15,9% dari total Rekapitulasi Penerimaan Tahun 2021

Analisis Persentase Rekapitulasi Penyetoran PNBP KSU Belawan

Setelah penerimaan PNBP pada kantor Kewsyahbandaran Utama Belawan dilanjutkan dengan tahap penyetoran. Berikut adalah data rekapitulasi Penyetoran penerimaan negara bukan pajak pada KSU Belawan tahun 2021. Untuk Analisis Persentase Rekapitulasi Penyetoran PNBP dapat dijelaskan pada gambar berikut ini :

Table 3. Analisis Persentase Rekapitulasi Penyetoran PNBP

NO	BULAN	PENYETORAN					JUMLAH
		RAMBU	PUP	PUJK	TRANSPORTASI LAINNYA	KONSESI	
0	SALDO	0	0	0	0	0	0
1	JANUARI	881.331.295	129.950.705	0	0	0	1.011.282.000
2	FEBRUARI	995.886.856	166.884.965	0	0	0	1.162.771.821
3	MARET	1.062.020.997	243.414.580	0	0	0	1.305.435.577
4	APRIL	909.104.552	171.310.755	0	0	0	1.080.415.307
5	MEI	925.780.130	163.592.205	0	0	0	1.089.372.335
6	JUNI	853.269.216	217.048.625	0	0	0	1.070.317.841
7	JULI	1.054.289.638	161.293.620	0	0	0	1.215.583.258
8	AGUSTUS	955.903.668	197.040.195	0	0	0	1.152.943.863
9	SEPTEMBER	933.171.915	153.841.750	0	0	0	1.087.013.665
10	OKTOBER	850.364.278	163.318.080	0	0	0	1.013.682.358
11	NOVEMBER	956.064.611	175.149.845	0	0	0	1.131.214.456
12	DESEMBER	940.690.850	196.326.480	0	0	0	1.137.017.330
	JUMLAH	11.317.878.006	2.139.171.805	0	0	0	13.457.049.811

Gambar 2. Rekapitulasi Penyetoran PNBP KSU Belawan Periode s/d Desember Tahun Anggaran 2021

Dari gambar dan data diatas, jumlah penyetoran PNBP Per tahun 2021 sama dengan jumlah penerimaan PNBP Pertahun 2021. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diserahkan 100% dari jumlah penerimaan PNBP yaitu sebesar Rp 13.457.049.811,-.

SIMPULAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) haruslah segera disetor ke kas negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 pasal 13 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku dalam kementerian perhubungan Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan Wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara. Dan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan menyetor seluruh penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima dari pelayanan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Negara Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Uu No. 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 pasal 13 Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran utama
- Hastuti, H. 2018. Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Pada Balai Taman Nasional Wakatobi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 1, No. 2.
- Renata,Tesa & Wilda. 2021. Analisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pajak*, Vol. 1, No. 1, Februari 2021, pp. 1-5
- Kusuma, R. Erman Jaya.2021 Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Basis Layanan Pada Kementerian/Lembaga.*Jurnal Good Governance*. Vol.17,No.2
- Budi, R., & Handayani, N. (2019). Pengendalian Internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Taman Nasional Bali Barat. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(2), 97
- Kurniasih, D. A. (2012). Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Rechtsvinding*, 5(2), 257–275
- Wijaya, Albert M.E & Emerald G.M. Tobing Prosedur Perencanaan Dan Anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok “ Jakarta Utara. *Buletin Ekonomi*. Vol.20 No.2
- Zulfrida, Maya dkk. 2022. Pengaruh Budaya Kerja, Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. *Jurnal UISU*. Vol 1, No 23
- Nur Ahmadi Bi Rahmani,M.Si, 2016. *Metodologi penelitian Ekonomi*. Medan. FEBI UI-SU Press.
- Erlina, dkk. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akual. Jakarata . Salemba Empat.